

ANALISIS REKLAMASI VENUE DAYUNG DI TELUK YOUTEFA KOTA JAYAPURA

Fred Andris Waroi¹, Johni J. Numberi², Janviter Manalu³

¹⁾ Mahasiswa Program Magister Perencanaan Wilayah dan Kota
Program Pascasarjana Universitas Cenderawasih

³⁾ Program Magister Perencanaan Wilayah dan Kota
Program Pascasarjana Universitas Cenderawasih

Alamat Korespondensi
e-mail: freedandriswaroy@gmail.com

ABSTRACT

The coastal area is one of the potential resources. The coastal area has the meaning of a transitional area between land and sea. According to Law No. 27 of 2007 Article 34 concerning the management of coastal areas and small islands, reclamation of coastal areas and small islands is carried out in order to increase the benefits and / or added value of coastal areas and small islands in terms of technical, environmental and socio-economic aspects. a research method consists of procedures and techniques that need to be carried out in a study. In connection with the coastal reclamation carried out in Youtefa Bay, Jayapura City, which is in the context of completing the 2021 PON in Papua Province. Jayapura City is the capital city of Papua Province which will be used as one of the places for the implementation of PON 2021 in Papua Province, so that several sports suggestions have been built in the city of Jayapura, one of which is the Rowing Venue facility built in Youtefa Bay, Jayapura City, this arena sports branch This research was conducted in Youtefa Bay (Holtekamp), administratively in the area of Jayapura City, Entrop Village, South Jayapura District. This infrastructure development is considered very important for the community because it can indirectly increase the living capital of those who live around the area. There needs to be extensive reforestation of mangrove forests that have been logged.

Keywords: Reclamation, Vanue Paddle, Youtefa, Jayapura City.

1. PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang No. 27/2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, tepatnya Pasal 34 menyebutkan bahwa reklamasi pesisir dan pulau kecil ditujukan untuk meningkatkan manfaat atau nilai tambah bagi wilayah tersebut secara teknis, lingkungan, sosial, dan ekonomi. Namun, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam reklamasi. Pertama, aspek keberlanjutan ekologis dan ekonomi masyarakat kawasan pesisir. Kedua, keseimbangan antara tujuan reklamasi dengan aspek kelestarian kawasan. Ketiga, syarat teknis pengambilan,

pengerukan, dan penimbunan material untuk kebutuhan reklamasi.

Kota Jayapura adalah sebuah kota pesisir di Indonesia yang masyarakat aslinya adalah masyarakat adat yang mendiami pesisir Kota Jayapura, memiliki Kearifan lokal berupa hukum adat yang berlaku di masyarakat. Bushar (2006) mengatakan bahwa hukum adat mengatur tingkah laku manusia dalam hubungan satu sama lain, kebiasaan (kesusilaan), serta keseluruhan peraturan yang mengenal sanksi terhadap pelanggaran.

Sehubungan dengan reklamasi pantai yang dilaksanakan di Teluk Youtefa Kota Jayapura yaitu dalam rangka menyesuaikan PON 2021 di Provinsi

Papua. Kota Jayapura adalah Ibu Kota Provinsi Papua yang akan dijadikan sebagai salah satu tempat pelaksanaan PON 2020 di Provinsi Papua, sehingga beberapa sarana olahraga di bangun di kota jayapura salah satunya adalah sarana Venue Dayung yang di bangun di Teluk Youtefa Kota Jayapura, arena ini dapat digunakan untuk cabang olahraga dayung, layar, renang perairan terbuka dan selam.



Gambar 1. Lokasi reklamasi di Teluk Youtefa Tobati-Injros, untuk Urena Olahraga Venue Dayung (PON 2021)

Sumber : <https://tiffanews.com>

Ada tiga hal yang perlu diperhatikan dalam proyek Teluk Youtefa. Pertama, pertimbangan hutan mangrove yang menjadi penyangga ekonomi masyarakat kampung Enggros, Tobati, dan Nafri. Relasi masyarakat dengan lingkungan alam bahkan melampaui konteks ekonomi. Kedua, status hutan di kawasan ini adalah hutan lindung yang merupakan hutan yang tidak boleh dijadikan tempat produksi. Terlebih kawasan ini juga masuk kriteria kawasan konservasi Taman Wisata Alam (TWA). Penolakan juga diungkapkan oleh warga yang tidak setuju dengan penimbunan di Teluk Youtefa, pembangunan Venue Dayung di Teluk Youtefa dengan cara ditimbun jauh lebih merugikan dari pada penggunaan misalnya, kayu atau beton (<https://jubi.co.id>).

Menurut Onoafi Besar Tombati-Enggros Herman Hamadi, penimbunan laut berdampak pada kerusakan lingkungan, dan sistem interaksi masyarakat di sekitar kawasan Tobati dan Enggros, termasuk wilayah Abe Pantai Kota Jayapura. Sehingga dapat dikatakan bahwa dampak kerusakan penimbunan di kawasan ini tidak hanya

berdampak pada alam tetapi juga manusia. (<https://tiffanews.com>).

Berdasarkan pernyataan Onoafi Besar Tobati-Enggros dan Tokoh Adat, Titus Hamadi dan beberapa akademisi mengenai dampak dari reklamasi di Teluk Youtefa yang dilansir dari Tiffanews dan jubi, maka untuk mengetahui apa dampak positif dan dampak negatif yang akan dirasakan oleh masyarakat adat yang mendiami Teluk youtefa atau Kampung Tobati dan kampung Injros dimasa yang akan datang. Karena pada dasarnya penduduk Tobati-Injros memiliki mata pencaharian sebagai Nelayan Tradisional

Menurut Bengen dalam Tuhumury (2012), pengelolaan terpadu sangat dibutuhkan untuk menghindari dampak pencemaran atau sedimentasi pada wilayah pesisir, serta abrasi pantai. Pengelolaan kawasan dengan demikian tidak abai pada praktik pembangunan keberlanjutan.

Dahuri et al, 2001 dalam Effendy (2009) menyatakan bahwa pemanfaatan kawasan harus memperhatikan aspek lingkungan hidup jangka panjang karena sebagian besar kerusakan ekosistem terjadi karena pengabaian ini. Meski pada dasarnya pembangunan merupakan proses perubahan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup manusia dan pemanfaatan sumberdaya alam.

Berdasarkan UU No. 26/2007 tentang penataan ruang, kebijakan tata ruang wilayah pesisir dan laut dirumuskan adalah untuk,

1. Terlaksananya pemanfaatan ruang atau sumber daya dan jasa lingkungan.
2. Terlaksananya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan budidaya wilayah pesisir dan kelautan.
3. Tercapainya pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan kelautan yang berkualitas.

Dalam bahasa inggris, reklamasi berarti melakukan perbaikan. Lebih spesifik lagi, Departemen Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa reklamasi sebagai pekerjaan memperoleh tanah. Kedua definisi ini berasal dari kata yang sama, yakni reclaim. Ada beberapa sumber yang mendefinisikan arti dari reklamasi yaitu sebagai berikut :

1. Perpres No. 122/2012, Permen KP No.28/2014, dan Permen PU No. 40/PRT/M/2007, menjelaskan bahwa reklamasi sebagai kegiatan dalam rangka mengangkat manfaat

sumber daya kawasan, ditinjau dari perspektif lingkungan dan sosio ekonomi.

2. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 52/2011 yang kemudian diperbaharui permenhub No.136/2012 menyebutkan bahwa reklamasi sebagai kegiatan penimbunan pada air atau pesisir yang menyebabkan garis pantai dan kedalaman air berubah.
3. Kemudian Pedoman Pengembangan Reklamasi Pantai dan Perencanaan Bangunan Pengamanannya (2004) menyebutkan bahwa reklamasi meningkatkan manfaat sumber daya lahan yang menjadi lokasi. Manfaat ini dilihat dari segi lingkungan, kebutuhan ekonomi masyarakat atau nilai ekonomi.
4. Sementara menurut perencanaan Kota (2013), disebutkan bahwa reklamasi sebagai peningkatan fungsi lahan yang sebelumnya dianggap kurang produktif menjadi lebih produktif. Cara yang dilakukan adalah dengan menurunkan permukaan air laut, menambahkan saluran, tanggul, atau melalui pengurugan.
5. Selanjutnya menurut Modul Pedoman Perencanaan Tata Ruang (2007) Kawasan Reklamasi sebagai kegiatan yang menggunakan kawasan yang masih kosong, atau memiliki air menjadikannya lebih berguna.

Wisnu Suharto (2008) menjelaskan bahwa reklamasi pada dasarnya sebagai pekerjaan yang mengubah kawasan perairan menjadi daratan atau untuk meningkatkan permukaan tanah agar tidak terpengaruh genangan air.

Reklamasi dengan demikian menjadi upaya membentuk kawasan baru dengan mengurug, ataupun drainase untuk meningkatkan manfaat lahan dari segi sosio ekonomi maupun segi lingkungan. Kemudian reklamasi pantai berarti upaya pembangunan kawasan baru yang menyatu dengan kawasan pantai maupun terpisah (Mustaqim, 2015).

Reklamasi pantai juga berkaitan dengan cara untuk melakukan pemekaran kota. Hal ini karena reklamasi membentuk daratan baru di kawasan pantai. Negara-negara maju dan kota besar dengan pertumbuhan pesat yang membutuhkan lahan lebih luas melakukan reklamasi sebagai alternatif pemenuhan kebutuhan lahan ini (Mustaqim, 2015).

Farhan (2008) tata kelola dan penggunaan lahan, baik dari segi ekonomi maupun ekosistem pantai memberikan keuntungan bagi wilayah sekitar. Pengelolaan ini memberi pilihan ketersediaan lahan yang lebih luas, dan terbangunnya wisata bahari baru. Sehingga reklamasi dalam hal ini menjadi kebutuhan dan membawa pada kemaslahatan.

Namun, perubahan pantai untuk reklamasi bukan hanya berdampak pada hal positif. Hal ini karena reklamasi berkaitan dengan ekosistem laut dan relasi masyarakat dengan alam. Dampak reklamasi pun mencakup perubahan untuk jangka panjang. Sehingga perlu pertimbangan lebih matang dan kompleks, terkait ekosistem dan perubahan sikap masyarakat setempat (Djakapermana, 2013 dalam Mustaqim, 2015).

Dampak buruk reklamasi karena perhatian pada intervensi manusia, bukan karena faktor alamiah. Perubahan yang buruk misalnya hidro-oseanografi, peningkatan erosi, sedimentasi, dan faktor lain juga menjadi imbas buruk reklamasi dari sisi fisik. Sementara pada sisi biologis, reklamasi mengganggu ekosistem tanaman penyangga pantai seperti mangrove, terumbu karang, dan keanekaragaman hayati lainnya. Dampak buruk selanjutnya dari segi sosial ekonomi masyarakat kawasan setempat yang menggantungkan hidupnya pada keberadaan laut seperti petani tambak, terutama nelayan yang hasil tangkapannya berkurang karena reklamasi (Mustaqim, 2015). Hal senada dikemukakan Choirul (2013) yang mengatakan bahwa reklamasi memengaruhi sulitnya publik mengakses pantai dan menyusutnya mata pencaharian di laut.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan di Teluk Youtefa (Holtekamp), secara administratif merupakan wilayah Kota Jayapura Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan. Waktu penelitian atau pengambilan data lapangan ditetapkan untuk penelitian tesis selama 2 bulan yaitu dari bulan Oktober 2020 – November 2020.

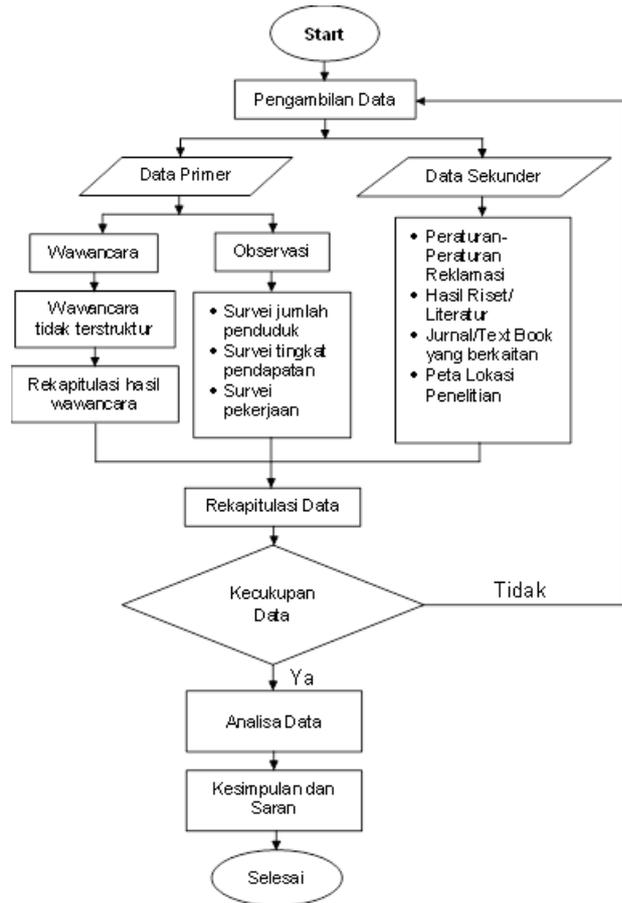


Gambar 2. Denah Lokasi Penelitian
Sumber: UNIPA (<http://google.com>)

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Sugiyono (2009) menjelaskan bahwa fungsi metode adalah memberikan deskripsi atau penggambaran objek penelitian menggunakan data atau sampel yang telah dikumpulkan seperti adanya, tanpa memberikan kesimpulan umum. Sehingga penelitian ini berusaha menggambarkan data sebagaimana adanya menyangkut situasi subjek ataupun fenomena yang dikumpulkan dalam sebuah populasi. Data diperoleh secara deskriptif melalui studi literatur.

Untuk pengambilan sampel pada Responden (Masyarakat Nelayan) yang tinggal di sekitar kawasan reklamasi menggunakan metode Total Sampling/Sampling Jenuh yaitu teknik penentuan sampel apabila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 2012). Metode pengumpulan data ini digunakan dalam populasi kecil dan kurang dari 30 orang, sehingga generalisasi kesalahan menjadi kecil. Sesuai data jumlah masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan di Kampung Tobati-Enjros yaitu 20 orang, Hamadi Pantai 5 orang dan Argapura Pantai 5 orang, sehingga peneliti mengambil semua sampel total sebanyak 30 orang.

Untuk melaksanakan kegiatan penelitian maka disusunlah diagram alir penelitian seperti ditunjuk pada Gambar 3.2 di bawah ini.



Gambar 3. Diagram Alir Penelitian
Sumber : Data Penelitian, 2020

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sekitar awal tahun 2018 ke bawah kondisi fisik lokasi penelitian mengalami abrasi pantai yang diakibatkan oleh gelombang laut dan arus seperti Pantai Cibery dapat dilihat pada Gambar 4.9.



Gambar 4. Kondisi Pantai Cibery yang mengalami Abrasi

Sumber: <https://www.ceposonline.com>

Persepsi masyarakat yang menempati lokasi penelitian, mengenai adanya reklamasi pantai di Teluk Youtefa Kota Jayapura dilakukan dengan metode wawancara. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara tidak terstruktur, tetapi pertanyaannya berfokus pada pembangunan reklamasi Pantai Teluk Yotefa Kota Jayapura. Wawancara dilakukan terhadap 17 responden, seluruhnya menyatakan setuju dan mendukung untuk dilakukan pengembangan kawasan (pembangunan tembok laut dan reklamasi). Namun, bagi masyarakat, pengembangan ini perlu diikuti dengan pertimbangan keamanan masyarakat setempat terkait dengan kawasan wisata, di mana kawasan menjadi lebih nyaman, lebih terbuka dan lebih bebas.

Analisis Pembangunan Groin

Seperti yang diuraikan sebelumnya, bahwa pantai teluk Youtefa adalah pantai pasir yang sangat tipis yang terbentuk oleh "sand spit" memanjang pantai, dan membuat laguna yang cukup indah. Di dalam laguna tersebut terdapat Kampung Enggros yang demikian menarik. Agar supaya pantai Youtefa tersebut tidak bertambah tipis, dan kalau bisa makin tebal (lebar) maka perlu transpor sedimen yang menuju ke arah barat jangan dibiarkan masuk ke muara yang berada dibawah jembatan Youtefa, yaitu dengan menahan sedimen tersebut dengan bangunan groin. Dengan adanya bangunan groin tersebut diharapkan pasir akan terhenti dan mengendap di sepanjang pantai, dengan demikian pantai teluk Youtefa dapat bertambah tebal.

Struktur groin dibangun dengan menggunakan tumpukan batu sehingga mampu meredam gelombang dan merupakan bangunan yang fleksibel sehingga tidak akan rusak bila terjadi penurunan yang tidak merata. Jetty dibuat selain untuk tujuan untuk menangkap pasir sehingga pantai menjadi lebih tebal juga bertujuan untuk mengembangkan kawasan pantai Cibery menjadi pantai wisata air yang menarik. Dengan demikian groin tersebut menjadi bangunan pendukung wisata, yaitu sebagai gardu pandang. Ujung groin dibuat menjadi agak lebar sehingga bisa dimanfaatkan oleh para wisatawan untuk berfoto dan menikmati jembatan Youtefa.

Analisis Pembangunan Tembok Laut

Bangunan tembok laut dibuat pada dua lokasi, yaitu di:

- a. Lokasi Wisata Cibery, yang saat ini tererosi/terabrasi dan,
- b. Lokasi pangkal Kawasan
- c. reklamasi

Kondisi kawasan wisata Cibery saat ini sedang terabrasi cukup parah, sehingga perlu segera mendapatkan penanganan agar supaya tidak menjadi lebih parah. Tembok laut yang akan dibangun disini adalah tembok laut yang mendukung dan bermanfaat bagi kawasan wisata Cibery tersebut. Perencanaan tembok laut tersebut nantinya akan mempertimbangkan kelengkapan wisata diantaranya adalah:

- a. Jalan setapak
- b. Saluran drainase
- c. Dinding tanggul sekaligus berfungsi tempat duduk, dan
- d. Tangga menuju perairan (laut)

Sedangkan tembok laut yang berada di sepanjang jalan, di kawasan venue dayung, terutama ditujukan untuk memperkuat jalan beserta bahunya, yang nantinya akan dikembangkan untuk kawasan parkir mobil dan tempat menikmati lomba dayung. Tembok laut disini nantinya direncanakan dengan mempertimbangkan beberapa hal dibawah ini:

- a. Tersedia jalan setapak sepanjang tembok laut
- b. Tersedia tempat parkir mobil disepanjang tembok laut dengan cukup lebar
- c. Tersedia dinding tembok laut yang tidak begitu tinggi, dan mercunya bisa untuk duduk-duduk.
- d. Tidak terlalu banyak merusak pohon mangrove yang ada.

Analisis Pembangunan Penahan Lahan Reklamasi

Bangunan penahan lahan reklamasi berada disekeliling rencana lahan reklamasi dan di sepanjang kanan kiri jalan penghubung antara lahan reklamasi dan Jalan di sepanjang pantai Youtefa. Dinding penahan tersebut terbuat dari struktur tumpukan kubus beton, dan bagian atasnya dibuat *concrete cap* yang mampu menyatukan tumpukan kubus beton tersebut. *Concrete cap* tersebut nantinya dapat dikembangkan untuk menjadi pagar, dan disatukan dengan jalan setapak dan saluran drainase.

Kawasan reklamasi yang diperuntukkan Venue Dayung, lokasinya sangat terlindung karena berada didalam laguna Youtefa. Elevasi mercu tembok penahan reklamasi ada kaitan erat dengan elevasi lahan reklamasi yang telah ditetapkan + 1,50

m. Dengan demikian mercu tembok laut penahan reklamasi paling tidak dibuat pada elevasi 0,5 m berada di atas lahan reklamasi, sehingga elevasi mercu tembok sebagai penahan reklamasi.

Analisis Pembangunan Tembok Laut Cibery

Pantai wisata Cibery Lokasinya relative terlindung, sehingga gelombang yang terjadi disini tidaklah besar. Namun karena posisinya berada di ujung pantai ini sangat sensitif terhadap gangguan transport sedimen. Rumus yang digunakan untuk menentukan mercu tembok laut agar tidak terlimpasi oleh gelombang sama dengan rumus yang digunakan untuk penentuan mercu groin, hanya saja pada tembok laut sama sekali tidak boleh terlimpasi. Tembok laut dibangun pada tanah dasar (fondasi) sekitar – 0,50 m, sehingga elevasi mercu dapat ditetapkan, dengan asumsi tinggi gelombang sekitar 0,75 m, dan tinggi jagaan (*free board*) 0,40 m.

Bangunan Tembok Laut Kawasan Vanue Dayung

Pantai wisata Kawasan Venue Dayung, lokasinya sangat terlindung karena berada didalam laguna Youtefa. Elevasi mercu tembok laut ada kaitan erat dengan jalan masuk ke lokasi reklamasi dimana akan dibangun fasilitas untuk mendukung kegiatan lomba dayung. Elevasi lahan reklamasi ditetapkan +1,50 m, sedangkan Jalan pada elevasi +2,0 m. Tembok laut berada di sepanjang sisi jalan.

Analisis Sosial Budaya Ekonomi Masyarakat di Lokasi Penelitian

Masyarakat pesisir didefinisikan sebagai kelompok orang yang tinggal di daerah pesisir dan sumber kehidupan perekonomiannya tergantung secara langsung pada pemanfaatan sumberdaya laut dan pesisir.

Pengaruh reklamasi pantai di lokasi penelitian terhadap kehidupan masyarakat di sekitar kawasan penelitian bahwa penduduk yang tinggal di kawasan ini merupakan masyarakat pesisir di mana mata pencahariannya cukup bervariasi. Hampir keseluruhan masyarakat memiliki ketergantungan besar pada laut untuk kehidupan sehari-harinya. Mata pencaharian pun tak jauh dari kekayaan laut, seperti mencari ikan, cumi-cumi, kerang, dan memiliki keramba. Selain itu, ada pula usaha lain terkait pariwisata, seperti memiliki usaha warung dan speedboat. Di luar mata pencaharian tersebut memang ada warga yang

memiliki pekerjaan di luar pekerjaan di atas, namun dalam jumlah yang terhitung kecil. Meski begitu, aktivitas keseharian masyarakat setempat amat terpengaruh oleh lingkungan laut di sekitarnya. Lokasi tempat tinggal di area pengembangan ini membuat kehidupan keseharian mereka juga akan terpengaruh oleh pembangunan infrastuktur yang dilakukan di laut.

Kehidupan masyarakat di Kampung Enggros amat tergantung pada laut. Laut ini digunakan bersama-sama untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan bersama. Dalam hal lautan ini tidak ada status kepemilikan lahan laut oleh pribadi. Penggunaan laut diawasi oleh dewan adat dan Pemerintah Kampung. Apabila ada yang ingin menggunakan laut untuk kepentingan pribadi, harus memiliki izin dari Pemerintah Kampung karena laut di sekitar Teluk Youtefa merupakan laut adat.

Pengurusan izin ini biasanya dibicarakan melalui Kepala kampung, Dewan Adat, para tetua, atau Kepala Suku (Ondoafi/Kei). Meski begitu, untuk penggunaan sehari-hari laut digunakan bersama-sama. Banyak masyarakat Kampung Enggros menggantungkan hidupnya pada kekayaan laut. Di perairan ini, masyarakat biasa mencari ikan, cumi-cumi, hingga kerang. Untuk menangkap cumi-cumi, masyarakat memasang rompong di sekitaran laut Teluk Youtefa. Pemilihan tempat untuk rompong ini cukup bebas. Dengan luasnya lautan Teluk Youtefa, masyarakat tidak memiliki kesulitan ataupun berebut lokasi rompong. Luasan rompong pun bervariasi, mulai dari 50 m² hingga 300 m². Sementara untuk menangkap ikan, masyarakat di Kampung Enggros biasa berpindah-pindah. Pencarian kerang biasa dilakukan oleh perempuan di Kampung Enggros. Sebagian mencari di laut, tapi lokasi umum mencari kerang ada di Hutan Perempuan, hutan mangrove yang terletak di sepanjang pesisir Teluk Youtefa. Di luar itu, ada beberapa masyarakat yang juga memiliki keramba untuk memelihara ikan di rumahnya.

Selain sebagai wilayah untuk kegiatan nelayan, wilayah perairan di Teluk Youtefa juga penting bagi keseharian sebagai kawasan penyeberangan masyarakat dari Kampung Enggros ke daratan. Selain itu, pengembangan kawasan Pantai Cibery sebagai salah satu kawasan wisata turut meningkatkan kunjungan wisatawan untuk berwisata air di Teluk Youtefa. Terkait dengan keberadaan Pantai Cibery, pengembangan kawasan

ini nantinya sebagai kawasan wisata membutuhkan perlindungan pantai di sekitar pantai. Perlindungan dengan tembok laut ini diharapkan dapat menjaga pantai agar tidak rusak akibat gelombang. Melalui wawancara, secara umum responden baik di Pantai Cibery maupun di Kampung Enggros setuju dengan rencana tersebut. Hanya saja, harapan dari responden adalah tembok laut tersebut dapat diberi tiga tangga untuk turun ke pantai, agar pengunjung masih dapat bermain pasir.

Tentang rencana perlindungan tembok laut dilengkapi dengan jalan setapak dan tempat duduk/istirahat, juga disetujui oleh sebagian besar para responden. Mereka berpendapat bahwa bangunan tersebut dapat menunjang kegiatan wisata di Pantai Cibery, di mana selain memperindah mata, juga dapat dinikmati dan aman bagi pengunjung. Namun, ada kekhawatiran bahwa bangunan yang nyaman justru akan digunakan sebagai lokasi orang mabuk. Untuk itu, dapat dipertimbangkan untuk membangun pos-pos keamanan yang dapat menjaga keamanan di kawasan tersebut.

Tak luput dari pertimbangan adalah keberadaan hutan bakau di pesisir Teluk Youtefa. Hutan bakau secara adat merupakan bagian penting dalam kehidupan masyarakat. Untuk itu, masyarakat amat setuju dan bersedia untuk ikut berpartisipasi dalam perawatan dan pengelolaan hutan bakau di kawasan tersebut. Secara adat dan tradisi turun-temurun, sejak nenek moyang masyarakat di Kampung Enggros sudah memiliki kesadaran untuk merawat hutan bakau sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan mereka.

Dengan adanya pekerjaan pembangunan perlindungan tembok laut dan reklamasi, kehidupan masyarakat Kampung Enggros jelas akan terganggu. Namun, masyarakat berharap lokasi mereka akan semakin indah. Masyarakat Kampung Enggros juga berharap berkembangnya kawasan Teluk Youtefa dapat membuka lebih banyak lapangan pekerjaan ataupun kesempatan ekonomi yang lebih luas. Untuk itu diharapkan Pemerintah dan kegiatan pariwisata dapat terus bersinergi. Bangunan yang telah dibangun pun dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk jangka panjang.

Terkait terganggunya ritme kehidupan selama pembangunan dan adanya bangunan-bangunan baru, masyarakat berharap adanya kompensasi dari Pemerintah atau pihak

penyelenggara. Bagi pemilik rompong, menurut beberapa responden rompong dapat dengan mudah dipindahkan dan dicarikan lokasi lain karena kawasan masih luas. Sementara menurut responden lainnya, bantuan yang sesuai adalah bantuan keramba tancap, modal usaha maupun ganti rugi hak ulayat/lahan perairan yang digunakan. Meski begitu, terkait solusi ini harus ada kesepakatan dari semua warga, terutama mereka yang memiliki rompong dan berkegiatan di kawasan tersebut.

Sementara menurut responden, bentuk bantuan yang dapat membantu pengembangan kawasan Teluk Youtefa antara lain adalah bangunan gazebo untuk kawasan pantai, alat selam, *speedboat* untuk anak sekolah dan pelayanan kesehatan, serta keramba ikan sebagai pengganti rompong.

Untuk pembangunan infrastruktur, para responden berharap bahwa pengerjaan ini dapat dikerjakan dengan rapi dan dengan kualitas yang baik agar tahan lama. Dengan begitu, bangunan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dengan maksimal. Responden juga berharap bahwa kegiatan ini jangan sampai melanggar hukum atau aturan adat yang ada di kawasan tersebut, serta harus memperhatikan dampak-dampaknya pada lingkungan serta masyarakat setempat.

Pembangunan infrastruktur ini memang dinilai sangat penting bagi masyarakat karena secara tidak langsung dapat menambah modal hidup mereka yang hidup di sekitar kawasan tersebut. Untuk itu, para responden berpendapat bahwa urusan terkait hak ulayat sebaiknya segera diselesaikan agar pembangunan tidak diganggu oleh oknum-oknum masyarakat di sekitar venue.

Pengembangan kawasan ke arah kawasan wisata juga harus dipikirkan tak hanya sebatas infrastruktur bangunan. Responden juga berharap dipikirkan pula mengenai sumber daya manusia dan lingkungannya, salah satunya adalah pengelolaan sampah. Pelibatan masyarakat dalam kegiatan pariwisata juga dirasa perlu agar masyarakat juga merasa memiliki dan dapat ikut berkembang bersama daerahnya.

4. KESIMPULAN

Pembangunan infrastruktur ini memang dinilai sangat penting bagi masyarakat karena

secara tidak langsung dapat menambah modal hidup mereka yang hidup di sekitar kawasan tersebut. Untuk itu, para responden berpendapat bahwa urusan terkait hak ulayat sebaiknya segera diselesaikan agar pembangunan tidak diganggu oleh oknum-oknum masyarakat di sekitar venue. Dalam hal lautan ini tidak ada status kepemilikan lahan laut oleh pribadi. Penggunaan laut diawasi oleh dewan adat dan Pemerintah Kampung. Apabila ada yang ingin menggunakan laut untuk kepentingan pribadi, harus memiliki izin dari Pemerintah Kampung karena laut di sekitar Teluk Youtefa merupakan laut adat. Pengurusan izin ini biasanya dibicarakan melalui Kepala kampung, Dewan Adat, para tetua, atau Kepala Suku (Ondoafi/Kei).

Masyarakat Kampung Enggros juga berharap berkembangnya kawasan Teluk Youtefa dapat membuka lebih banyak lapangan pekerjaan ataupun kesempatan ekonomi yang lebih luas. Untuk itu diharapkan Pemerintah dan kegiatan pariwisata dapat terus bersinergi. Bangunan yang telah dibangun pun dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk jangka panjang.

5. DAFTAR PUSTAKA

- _____, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2012, tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- _____, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007, tentang Penataan Ruang.
- _____, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 Pasal 34, tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.
- Ben Tukan. 2020. Considered Violating Customary Order, Ondoafi Herman Hamadi Demands the Tobati-Hamadi Marine Reclamation Project to Stop. Tiffanews [Online]. Available: <https://tiffanews.com/dianggap-langgar-tatanan-adat-ondoafi-minta-proyek-reklamasi-laut-tobati-hamadi-dihentikan/> [Accessed].
- Bengen DG. 2004. Sinopsis Teknik Pengambilan Contoh dan Analisis Data Biofisik Sumberdaya Pesisir. Pusat Kajian Sumber Daya Pesisir dan Laut IPB. Bogor
- Bushar, Muhammad. 2006. Pokok-Pokok Hukum Adat. PT Pradnya Paramita. Jakarta.
- Choiril Huda, Moch. 2013. Jurnal: Pengaturan Perizinan Reklamasi Pantai Terhadap Perlindungan Lingkungan Hidup. Perspektif. Surabaya
- Dahuri, R., Jacob Rais, Sapta Putra Ginting, dan M.J. Sitepu. 2001. Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Lautan secara Terpadu. PT Pradnya Paramita, Jakarta. 326 hal.
- Djakapermana, D. R. 2013. Reklamasi Pantai Sebagai Alternatif Pengembangan Kawasan, (Artikel). Direktorat Jenderal Penataan Ruang, Departemen Pekerjaan Umum – RI. Jakarta.
- Farchan, M. 2008. Reklamasi sebagai Alternatif Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pantai Kota Semarang. Semarang.
- Mampiooper, Dominggus. 2020. Fasilitas PON Papua menghantam hutan lindung Teluk Youtefa . Jubi [Online]. Available: <https://jubi.co.id/fasilitas-pon-papua-di-hutan-lindung/> {Accessed}.
- Mustaqim, I. 2015. Dampak Reklamasi Pantai Utara Jakarta terhadap Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat (Tinjauan Sosiologis Masyarakat di Sekitaran Pelabuhan Muara Angke, Kelurahan Pluit, Jakarta Utara). Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Peraturan Menteri PU No. 40/PRT/M/2007 tentang Pedoman Perencanaan Tata Ruang Kawasan Reklamasi Pantai.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia No.r 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta.
- Wisnu Suharto. 1996. Reklamasi Pantai dalam Perspektif Tata Air. Semarang: Unika Soegijapranata.